

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan abad mutakhir peran globalisasi terasa sangat mendominasi aktivitas masyarakat sehingga sistem pendidikan yang baik dirasa sangat dibutuhkan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya peran lembaga pendidikan. Keberadaannya harus dilaksanakan secara komprehensif dan simultan antara sistem tata nilai yang harus dipatuhi dengan kerja nyata, konsisten, dan istiqomah yang ditunjukkan para pelaksana pendidikan, sehingga keinginan untuk memenuhi tuntutan kompetensi secara utuh (pengetahuan, *attitude*, dan *skill*) dapat terpenuhi. Pendidikan model seperti ini yang sesungguhnya merupakan syarat bagi terlaksananya proses “pembudayaan”, yakni bekal untuk mempersiapkan seorang anak manusia yang bisa menjalani kehidupan secara baik dan mampu beradaptasi dengan suasana pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian secara lebih baik. Masyarakat modern adalah masyarakat berpendidikan. Suatu masyarakat yang setiap anggotanya adalah manusia yang bebas dari ketakutan, bebas berekspresi, bebas untuk menentukan arah kehidupannya di dalam wadah persatuan dan kesatuan nasional. (H.A.R. Tilaar, 1999, 16) Sehingga nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sudah sepenuhnya tertanam kuat dalam tradisi masyarakat luas.

Abad modern juga telah melahirkan tatanan kehidupan yang sarat dengan kemajuan teknologi, informasi, dan globalisasi. Kondisi tersebut mau tidak mau telah mendorong terjadinya kompetisi bagi lembaga pendidikan yang tidak hanya bersifat lokal atau regional saja, melainkan internasional. Kompetisi global

tersebut membawa dampak di sektor pendidikan, salah satunya internasionalisasi pendidikan tinggi. Internasionalisasi pendidikan tinggi oleh Supriadi (2000:11) terwujud melalui empat bentuk. Pertama, dibukanya cabang-cabang perguruan tinggi di negara lain (semacam kelas ekstension), misalnya perguruan tinggi Amerika membuka cabang di Asia. Kedua, kerjasama antara perguruan tinggi dari suatu negara dengan perguruan tinggi di negara lainnya yang menawarkan program gelar. Ketiga, kuliah jarak jauh baik melalui media cetak maupun secara virtual melalui internet. Sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Amerika, Eropa, dan Australia menawarkan program gelar melalui model ini. Keempat, studi perbandingan mutu pendidikan tinggi yang menghasilkan peringkat perguruan tinggi dibandingkan dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Kompetisi global tersebut mau tidak mau harus dihadapi oleh pendidikan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta.

Menghadapi keadaan tersebut, hanya dua pilihan yang dapat diambil. Pilihan itu ialah menyerah dan membiarkan diri tergerus oleh arus globalisasi atau secara cerdas mengambil manfaat dari proses globalisasi. Jika pilihan kedua yang diambil, maka kita harus memiliki kesiapan memasuki *the world systems* tersebut. Itu berarti, perlu dilakukan persiapan dan penataan berbagai perangkat yang dimiliki agar dapat menghadapi era tersebut dengan baik. Kunci keberlanjutan dan keberhasilan suatu bangsa atau negara dalam *era of human capital* atau *knowledge society* ini terletak pada kualitas sumber daya manusia.

Kehidupan abad modern menuntut manusia unggul dan hasil karya yang unggul. Artinya ada dua jenis keunggulan yang menjadi tuntutan manusia unggul, yakni: 1) unggul secara personal, bentuk keunggulan yang sangat berkaitan dengan kompetensi, kapabilitas dan profesionalitas dalam melakukan aktifitas; dan 2) keunggulan partisipatoris dalam bentuk jaringan (*networking*). Hal ini

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

karena masyarakat abad 21 adalah masyarakat yang terbuka yang memberikan berbagai jenis kemungkinan pilihan. Dengan sendirinya hanya manusia yang unggul yang dapat *survive* di dalam kehidupan yang penuh persaingan dan menuntut kualitas kehidupan. (H.A.R. Tilaar: 1999, h. 55)

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, dan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan tanggung jawab bidang pendidikan, terutama mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang semakin berperan dalam menampilkan dirinya yang memiliki kompetensi, tangguh, kreatif, mandiri dan profesional. Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa.

Menurut Tilaar, pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi, atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada tujuh masalah pokok sistem pendidikan nasional: (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, (2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, (4) terjadinya degradasi moral peserta didik, (5) status kelembagaan, (6) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (7) sumber daya yang belum profesional (Tilaar, 1999: 41-43).

Menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan penataan terhadap sistem pendidikan nasional secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill* atau *life competency*) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. Peserta didik di setiap lembaga pendidikan diharapkan

mempunyai kemampuan dan keunggulan dan siap bersaing dalam kehidupan bermasyarakat.

Peningkatan kemampuan dan keunggulan tersebut tentu saja perlu ada perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam kondisi tersebut setiap komponen dalam pendidikan tentu saja harus saling mendukung dan terikat satu sama lain. Adapun komponen pendidikan yaitu meliputi tujuan, peserta didik, guru atau pendidik, isi atau kurikulum, manajemen, alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, biaya, lingkungan, dan evaluasi.

Guru merupakan komponen terpenting dalam pendidikan, kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan, posisinya memiliki peran yang cukup strategis, *central*, bahkan menjadi komponen pendidikan yang paling menentukan terjadinya interaksi edukatif dalam pembelajaran. Guru merupakan orang pertama yang mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai, budaya, dan agama terhadap anak didik, dalam proses pendidikan guru memegang peran penting setelah orang tua dan keluarga di rumah. Di lembaga pendidikan, guru menjadi orang pertama yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih anak didik mencapai kedewasaan. Setelah proses pendidikan sekolah selesai, diharapkan peserta didik mampu hidup dan mengembangkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman yang sudah melekat di dalam dirinya (Martinis Yamin: 2005: 64). Hal ini sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa: "guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

Fauzan, 2014

***Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Untuk menjadi pendidik yang profesional, pendidik harus mengetahui arti dari ”pendidikan” dan ”pembelajaran”, sehingga menjadikan perbedaan dari keduanya dapat dipahami. Terdapat perbedaan mendasar antara ”pendidikan” dengan ”pembelajaran”, sebagaimana kesalahan pemahaman yang terjadi pada masyarakat yang menganggap keduanya memiliki arti yang sama. Pembelajaran dipahami sebagai satu proses penyampaian pengetahuan atau proses memberitahu orang lain (*transfer of knowledge*). Oleh karenanya, hampir semua orang dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Sementara, pendidikan harus dipahami sebagai upaya memberikan wawasan keilmuan, keterampilan, perubahan nilai (karakter), sikap, bahkan mengarahkan peserta didik sesuai tujuan pendidikan. Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2003). Sementara, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang senantiasa taat kepada Allah SWT, pemimpin (*khalifah*) di muka bumi, sehingga kesuksesan dunia ukhrowi menjadi tujuan setiap muslim.

Untuk sampai pada tujuan tersebut, tentu saja tidak sembarang orang dapat melakukan kegiatan pendidikan. Pendidik (baca: guru, dosen) disyaratkan memiliki kualifikasi secara akademik, serta *capabilitas*, kemampuan (*competency*) dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan.

Hal lain yang tak kalah penting adalah kurikulum. Dalam sistem pendidikan formal, kurikulum memiliki peran yang sangat strategis karena menghubungkan idealisme cita-cita pendidikan dengan kenyataan/praktik pendidikan. Kurikulum merupakan bentuk pengejawantahan dari idealisme dan aspirasi pendidikan dalam bentuk nyata yang akan diwujudkan dalam praktik pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai alat dan sekaligus sebagai gambaran seperti apa praktik pendidikan harus dilaksanakan dan apa yang harus dicapainya. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan pendidikan, sehingga hasil pendidikan sangat diwarnai oleh keberadaan kurikulum tersebut. Kedudukan kurikulum yang *urgent* itu yang menyebabkan keberadaannya selalu menjadi fokus utama dalam setiap perubahan/perbaikan sistem pendidikan.

Guru dan kurikulum merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Semua komponen lain, seperti sarana-prasarana, biaya, pengelolaan, metode, dan pendekatan tidak banyak berarti apabila esensi pembelajaran, yaitu interaksi guru dengan peserta didik serta kurikulum yang diajarkannya tidak berjalan dengan baik. Semua komponen pendidikan tersebut sangat bergantung pada posisi guru dan materi yang diajarkannya (kurikulum).

Begitu penting peran guru dan kurikulum dalam mentransformasikan input-input pendidikan, sampai banyak pakar menyatakan bahwa di sekolah tidak ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru dan proses pengembangan kurikulum.

Kurikulum mengandung muatan akademis, namun penerapannya berdasarkan teknis dan membutuhkan banyak pengalaman guru. Sebagai sebuah proses, pengembangan kurikulum harus dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari pihak kementerian pendidikan nasional (baca: pusat kurikulum), pakar-pakar ilmu pendidikan, administrator pendidikan, orang tua, peserta didik, hingga guru

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagai pengembang kurikulum yang secara operasional dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Bagi Oemar Hamalik, guru dianggap sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan kurikulum, guru memegang banyak peranan yang sangat penting dan krusial. Perannya sebagai pengembang kurikulum, antara lain melakukan: 1) pengelolaan administratif; 2) pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum; 3) meningkatkan keberhasilan sistem intruksional; 4) meningkatkan pemahaman konsep diri; serta 5) memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan peserta didik. Dalam konteks pengembangan kurikulum, guru adalah sosok yang paling "bertanggung jawab" dalam penyuguhan materi yang diajarkan. Pembelajaran harus didasarkan pada pencapaian indikator kompetensi (IK) yang telah disiapkan guru. Setiap guru mengemban tanggung jawab secara efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengadministrasian dan perubahan kurikulum. Keterlibatan guru juga turut menentukan keberhasilan pengajaran di sekolah. Karena pada dasarnya, para guru itulah yang paling mengetahui berbagai masalah kurikulum yang telah dilaksanakan. "Oleh sebab itu, berbagai saran mereka sangat diperlukan dalam perencanaan atau penyusunan kurikulum baru, tentu saja melalui prosedur langsung maupun tidak langsung". (Oemar Hamalik, 2009; 52)

Untuk sampai pada tujuan tersebut, tentu saja guru diharapkan memiliki segenap kompetensi atau kumpulan kemampuan, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, serta dikuasai oleh guru dalam rangka menyelesaikan tugasnya sebagai "tenaga profesional", yaitu sosok yang secara profesionalitas menguasai segenap kemampuan yang menyangkut aspek, yaitu: a) Ilmu pengetahuan tertentu; b) Aplikasi kemampuan/kecakapan, dan c) Berkaitan dengan kepentingan umum.

Kunandar (2011: 45) mengemukakan bahwa "profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan

atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus". Sebagai suatu pekerjaan khusus mensyaratkan persiapan spesialisasi akademik dalam waktu yang relatif lama, baik dalam bidang sosial, eksakta, maupun seni, dengan penekanan pada aspek intelektual, mental, bukan pada aspek kemampuan fisik semata. Pendapat lain dikemukakan oleh Sikun Pribadi (1991: 1) mengatakan bahwa profesi pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa profesi itu pada hakekatnya muncul karena kesediaan pribadi seseorang secara terang-terangan untuk mengabdikan dirinya pada jabatan pekerjaan yang ditekuninya (Muh. Nurdin, 2004:120). Profesi juga pada hakekatnya adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) Bersangkutan dengan profesi, (2) Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (3) Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (Syafrudin Nurdin 2003 : 15). Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan dalam suatu hierarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat (Tilaar 2002 : 86). Profesi sendiri berarti menunjukkan lapangan yang khusus dan mensyaratkan studi dan penguasaan pengetahuan khusus yang mendalam. Profesi sangat berkaitan dengan penguasaan bidang keilmuan tertentu dan menjadi keahlian (*skill*) khusus, misalnya hakim, dokter, akuntan, advokat, komputer, dan guru. Guru dipahami sebagai profesi yang tidak sembarang orang mampu melakukannya, guru memerlukan keterampilan khusus untuk mengajar

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(*teaching skill*), pemahaman yang utuh tentang peserta didik ketika melaksanakan pendidikan, perlu kepribadian yang cakap dalam pembinaan dan lain sebagainya.

Berbagai pendapat di atas, pekerjaan profesional berarti pekerjaan yang hanya dapat dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan. Satu pekerjaan yang sangat membutuhkan wawasan keilmuan, kepribadian baik, serta memiliki keahlian atau ketrampilan (*skill*) untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, semakin tinggi pendidikan yang dilalui seseorang, maka semakin tinggi pula derajat profesi yang diembannya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat bergantung kepada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh.

Dalam konteks Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI), menurut Muhaimin (2008; 121) guru profesional seharusnya dibarengi dengan etos kerja yang tinggi, karena antara keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan mutu akademik atau produk kerja yang bermutu. Hanya saja, terkadang guru GPAI hanya menampilkan diri sebagai sosok guru spiritual dan/atau guru moral belaka yang lebih berkonotasi sufistik, dan dalam bentuk hubungan patron-klien (guru-peserta didik) dalam kehidupan mistik.

Suasana hubungan kesetiaan antara GPAI dan peserta didik tidak harus selalu berprespektif doktriner sebagaimana ungkapan di atas, tetapi harus diciptakan suasana hubungan kritis-dinamis yang dapat berimplikasi dan berkonsekuensi pada peningkatan daya kreativitas, etos ilmu dan etos kerja secara bersama-sama dari GPAI itu sendiri dan sekaligus peserta didiknya. (Muhaimin: 2008: 122)

Bila dilihat dalam kaca mata perundang-undang pendidikan, istilah "guru profesional" –termasuk GPAI—berarti guru secara kualifikasi akademik minimal berpendidikan D4/S1, dan secara kualitatif harus memiliki empat (4) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan

kompetensi sosial. Adanya undang-undang dan peraturan tentang guru professional tersebut, tentu saja berlaku secara nasional, termasuk di dalamnya kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam (selanjutnya baca: GPAI).

Program Jurusan/Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) –sebagai jurusan/prodi yang mencetak GPAI—Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan jurusan/prodi tertua yang berkiprah sejak tahun 1960 seiring dengan penetapan melalui SK Tap Menag RI No. 43 Tahun 1960. Ide pendiriannya sangat berhubungan erat dengan pendirian Sekolah Tinggi Islam (STI) di Padang pada tahun 1948, Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) tahun 1957. Periode ADIA berlangsung selama 5 tahun dengan 3 jurusan/program studi yang berkembang, yaitu: Pendidikan Agama, Bahasa Arab, dan Pendidikan Khusus Imam Tentara. (Profil Jurusan PAI UIN Jakarta: 2010, h. 5) Sebagai jurusan tertua, tujuan didirikannya PAI sebenarnya hampir sama dengan perkembangan PTAI, yakni ”melahirkan ahli-ahli agama dan para pemimpin Islam”, walaupun belakangan tujuan tersebut mulai diragukan banyak kalangan. Ada tiga fungsi tradisional PTAI, yaitu; *pertama*, sebagai media penyampai pengetahuan agama (*transfer of Islamic knowledge*), *kedua*, sebagai media pemelihara tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*) dan yang *ketiga*, sebagai media pencetak ulama (*reproduction of ulama*). (Jurnal Madrasah, Vol. I, No. 4, 1998, h. 6). Pertanyaannya adalah apakah dengan kondisi masyarakat terbuka sekarang, PTAI (STAIN, IAIN,UIN) akan terus bertahan dengan tujuan awalnya tersebut?

Sebagai jurusan yang sudah diakui pemerintah melalui status Akreditasi ”A”, sebenarnya jurusan PAI sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) memiliki peluang besar untuk berperan serta dalam memenuhi minat masyarakat. Bahkan dalam perkembangan berbagai aspek

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kehidupan masyarakat dewasa ini, dan pertumbuhan jumlah sekolah dan madrasah unggulan di wilayah Jabodetabek, telah menuntut keberadaan jurusan PAI FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat tampil lebih baik dan terus diminati. Hal ini tentu saja, memberikan peluang bagi jurusan PAI untuk terus menyediakan tenaga profesional dan andal dalam menghadapi persoalan tersebut juga semakin terbuka lebar seiring dengan akreditasi yang dilakukan Jurusan PAI.

Namun kondisi tersebut tidak semua dapat berjalan mulus, ada banyak tantangan yang kemudian muncul. Misalnya saja dengan bertambahnya Jurusan PAI di IAIN dan beberapa Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta di wilayah Jabodetabek yang cenderung menetapkan biaya studi lebih rendah dan waktu penyelesaian studi lebih cepat akan menjadi kompetitor bagi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Belum lagi munculnya berbagai Perguruan Tinggi lain yang lebih maju dan memiliki reputasi lebih baik dalam mengelola dan mengembangkan Jurusan Pendidikan Agama Islam yang berpotensi “mengancam” eksistensi Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Jakarta.

Sebagai jurusan yang secara kuantitas memiliki jumlah mahasiswa ”terbanyak” dan jurusan ”tertua” di lingkungannya, ternyata harapan untuk melahirkan sosok guru profesional ternyata masih belum maksimal, masih ada banyak persoalan yang hingga saat ini ada di jurusan/Prodi PAI. Persoalan tersebut dapat dilihat dari input penerimaan, proses pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi yang dilakukan. Kondisi inilah yang kemudian berakibat pada munculnya masalah-masalah di jurusan/Prodi PAI, seperti: 1) tidak ada standarisasi nilai khusus dalam penerimaan baru; 2) masih dominasinya pengajaran agama yang bersifat doktriner sufistik, 3) kurikulum yang belum berbasis Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 4) tidak adanya rumusan yang tepat antara Silabus dan SAP dengan SKL Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam, 5)

belum adanya keterkaitan konsep kurikulum dengan empat kompetensi dasar yang harus dimiliki guru, 6) kurang berimbangnnya ketersediaan dosen yang berbasis ilmu agama dan umum, 7) *output* lulusan PAI masih belum siap memenuhi tuntutan *stakeholders* lapisan masyarakat kelas menengah atas.

Persoalan pertama, tidak ada standarisasi nilai dalam penerimaan baru merupakan masalah tersendiri bagi setiap jurusan atau program studi yang nanti melakukan implementasi pembelajaran. Kesalahan pertama kali dalam pendidikan sebenarnya lebih pada sejauhmana seleksi tersebut dilaksanakan. Ketika seleksi tidak dilakukan dengan menjunjung tinggi aturan atau standar yang digunakan, maka hanya akan menghasilkan calon-calon yang tidak memiliki kemampuan standar. Sistem *ranking* seperti yang dilakukan sekarang, bagi penulis hanya akan menurunkan grad kualitas yang diinginkan. Kondisi ini hanya akan berakibat pada “tidak jelasnya” kemampuan yang diinginkan pada jurusan atau program studi. Kondisi ini akan semakin tidak menentu, jika calon yang mendaftar melampaui kapasitas, seperti di jurusan/Prodi PAI. Untuk data penerimaan baru lima (5) tahun terakhir, PAI termasuk jurusan yang memiliki jumlah peminat yang cukup besar ketiga, setelah program studi Pendidikan Kedokteran, dan Ekonomi. Sebagai jurusan yang memiliki tingkat popularitas cukup tinggi, sudah saatnya PAI mengusulkan adanya standar “khusus”, misalnya standar bahasa Arab dengan nilai 9, bisa baca kitab kuning, dan lain sebagainya. Hal ini karena, jurusan/Prodi PAI nantinya tidak hanya akan menyiapkan calon-calon guru yang mampu menguasai kemampuan akademik keilmuan PAI (al-Qur’an Hadis, SKI, Akidah Akhlak, dan Fiqh), tapi juga diharapkan memiliki ketrampilan mengajar (*teaching skill*), ditunjang dengan bekal pedagogik yang diharapkan. Jurusan/Prodi PAI sudah seharusnya melakukan terobosan baru terkait pola

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penerimaan baru, terutama terhadap penguatan kemampuan yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan professional.

Persoalan kedua, ketidaksesuaian kurikulum PAI dengan Standar Kompetensi Lulusan. Sebagai satu jurusan/prodi tertua, tentu saja PAI dapat menampilkan performa jurusan/Prodi yang dapat melahirkan lulusan yang memiliki kecakapan (*capabilitas*) keilmuan yang matang, mencakup ilmu-ilmu pedagogik, kependidikan, keislaman, hingga kemampuan keterampilan mengelola dan mengajar (*teaching skill*) di kelas. Untuk sampai pada keinginan tersebut, PAI FITK UIN Jakarta melakukan pengembangan jurusan/Prodi dengan visi: “menjadi program studi terkemuka dalam bidang pendidikan penelitian dan pengembangan pendidikan pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam”.

Keberadaan kurikulum PTAI saat ini masih belum mencerminkan kurikulum integratif yang diinginkan. Kurikulum yang seharusnya mencerminkan adanya struktur isi kurikulum yang berisi keilmuan, keislaman, IPTEK, serta sejalan dengan indikator kompetensi kelulusan yang diinginkan. Hal ini yang diungkap Sukiman (2011) dalam disertasinya “*Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam (Studi terhadap Desain dan Implementasi Kurikulum Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*”, beliau mengatakan bahwa untuk di jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Yogyakarta masih belum ada rumusan kompetensi dasar dan indikator kompetensi sebagai penjabaran dari standar kompetensi lulusan yang ada di Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga terlihat masih terlalu umum, belum memberikan arah yang jelas dan operasional. Hal ini terlihat dalam setiap mata kuliah/bahan kajian, yang sesungguhnya sangat mendukung pencapaian kompetensi guru.

Selain itu, meskipun Jurusan/Prodi PAI sudah beberapa kali melakukan perubahan kurikulum (kurikulum 1983, kurikulum 1988, kurikulumn 1995,

kurikulum 1997, kurikulum 2004 dan kurikulum 2005, kurikulum 2009, yang terakhir kurikulum 2011), namun rumusan rumusan kompetensi mulai dari standar kompetensi jurusan, kompetensi dasar jurusan dan indikator kompetensi yang terjabar dalam setiap mata kuliah/bahan kajian, masih belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kompetensi guru sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang profesi guru dan dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sehingga diperlukan pembenahan-pembenahan kurikulum agar lulusan PAI Fakultas Tarbiyah benar-benar siap menjadi guru yang memiliki 4 standar kompetensi profesional guru (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional).

Padahal sejak kelahirannya, jurusan/program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan satu di antara prodi tertua yang ada di PTAI yang telah banyak memproduksi lulusan yang dipersiapkan menjadi “guru profesional”.

Sejak ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, sebenarnya PTAI – termasuk PAI—memiliki otonomi untuk menyusun dan mengembangkan kurikulumnya sendiri. Hal ini dapat dipahami dari pasal 6 ayat (2), yaitu Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Persoalan ketiga implementasi kurikulum PAI yang ada di PTAI juga merupakan masalah. Padahal isi kurikulum jurusan atau program studi sangat berimplikasi pada kualitas lulusannya. Kurikulum yang baik akan menghasilkan produk lulusan yang baik (*competence*), sebaliknya tampilan kurikulum yang

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tidak baik juga akan berefek pada kualitas lulusan yang tidak kompeten. Berkaitan dengan statemen tersebut, Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam menjelaskan bahwa mutu lulusan PTAI (termasuk prodi PAI) sekarang ini dianggap masih kurang memenuhi harapan masyarakat, dan sumbangannya pada pengembangan ilmu agama Islam masih kurang signifikan. Hal itu antara lain disebabkan karena kelemahan kurikulum PTAI, yaitu: 1) kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, banyak program studi yang tidak diminati masyarakat tetap dipertahankan; 2) kurang efektif, yakni tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan harapan; 3) kurang efisien, yakni banyaknya mata kuliah dan sks tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai harapan; 4) kurang fleksibel, yakni PTAI kurang berani secara kreatif dan bertanggung jawab mengubah kurikulum guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (setempat, nasional tau global); 5) *readability* rendah, tidak komunikatif (bisa menimbulkan banyak tafsir); 6) hanya berupa deretan mata kuliah; 7) berbasis (berfokus) pada mata kuliah/penyampaian materi, bukan pada tujuan kurikuler/hasil belajar/mutu lulusan; dan 8) hubungan fungsional antar mata kuliah yang mengacu pada tujuan kurikuler kurang jelas. (Muhaimin, 2007; 221)

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan perwujudan dari pendekatan teknologis, sehingga dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisa kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Seseorang dianggap memiliki kompetensi dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu memerlukan: (1) *basic skill*, (2) *thinking skill*, dan (3) *personal quality*. (Muhaimin, 2007; 220)

Persoalan keempat, belum maksimalnya rumusan yang tepat antara Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dengan SKL Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam. Dari aspek pengembangan kurikulum, jurusan PAI menghendaki adanya kemampuan yang dapat dikuasai secara komprehensif oleh

terkait dengan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang diinginkan, yakni *memiliki keahlian sebagai guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah dan madrasah*. Dari aspek pengetahuan diharapkan lulusan Jurusan/Prodi PAI memiliki kemampuan: (1) Mampu memahami konsep pendidikan secara komprehensif; dan (2) Memiliki pengetahuan tentang substansi ilmu-ilmu ke-Islaman, metodologi dan strategi pembelajarannya secara berkesinambungan.

Dilihat dari aspek sikap diharapkan lulusan Jurusan/Prodi PAI memiliki kemampuan: (1) Menjadi guru Pendidikan Agama Islam yang profesional dan demokratis; dan (2) Menjadi guru Pendidikan Agama Islam yang berakhlak islami, cinta ilmu dan peka terhadap perkembangan pendidikan.

Dilihat dari aspek keterampilan diharapkan lulusan Jurusan/Prodi PAI memiliki kemampuan: (1) Mampu menerapkan teori pendidikan yang dimiliki dalam pelaksanaan pembelajaran; dan (2) Terampil dalam mengembangkan kurikulum dan metodologi pembelajaran PAI.

Untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus mendukung pencapaian kompetensi utama bagi para lulusan PAI, maka dirumuskan kompetensi pendukung lulusan yaitu memiliki kecakapan dalam mendesain dan melaksanakan penelitian pendidikan. Jabaran rumusan kompetensi pendukung dari aspek pengetahuan adalah memahami desain dan metodologi penelitian, dari aspek sikap adalah apresiatif terhadap hasil-hasil penelitian, dan dari aspek keterampilan adalah memiliki kemampuan membuat desain dan melaksanakan penelitian bidang pendidikan.

Jurusan/Prodi PAI sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keislaman berupaya pula membekali para lulusannya dengan kemampuan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya masyarakat sekolah

Fauzan, 2014

***Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(peserta didik) dengan menggunakan pendekatan agama. Oleh karena itu, dalam kurikulum Jurusan/Prodi PAI dirumuskan kompetensi lain yang akan mendukung dan memperkuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung yaitu diharapkan memiliki kecakapan teknik dan prosedur bimbingan dan konseling. Jabaran kompetensi ini dilihat dari aspek pengetahuan adalah memahami prinsip dasar bimbingan dan konseling, dari aspek sikap adalah memiliki tanggung jawab pengembangan kepribadian, dan dari aspek keterampilan adalah mampu melaksanakan bimbingan dan konseling sesuai dengan prinsip dasarnya secara tepat.

Melihat dari SKL yang direncanakan, idealnya jurusan/Prodi PAI sudah dapat menampilkan sosok jurusan yang secara kuantitas maupun kualitas bisa bersaing dengan jurusan lain, terkait dengan kemampuan lulusannya dalam melakukan proses pembelajaran, penguasaan materi ajar (Sejarah Kebudayaan Islam, Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, dan Fiqh), serta kiprahnya di masyarakat luas. Untuk sampai pada idealitas tersebut, seharusnya semua komponen pembelajaran seperti, silabus, SAP dan semua komponen yang ada di dalamnya ikut mendukung terlaksananya SKL yang diinginkan. Sayangnya, tidak semua silabus dan RPP yang ditampilkan sesuai dengan isi konsep SKL, sehingga pembelajaran lebih cenderung pada keinginan dosen pengampu mata kuliah, bukan berdasarkan pada "standar kemampuan apa yang seharusnya diberikan kepada mahasiswa".

Persoalan keenam, belum adanya keterkaitan konsep kurikulum dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki guru. Kompetensi dan perilaku yang dimiliki oleh guru diharapkan dapat membentuk profil GPAI, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas kependidikannya dapat berhasil secara optimal. Profil GPAI pada intinya terkait dengan aspek personal dan profesional dari guru. Aspek personal menyangkut pribadi guru itu sendiri, dan aspek profesional menyangkut

peran profesi dari guru, dalam arti memiliki kualifikasi profesional sebagai seorang GPAI (Muhaimin: 2008; 97). Selanjutnya istilah kompetensi yang harus dimiliki GPAI mencakup dua (2) hal, yaitu: kompetensi *personal religious* dan kompetensi *professional religious*. Kompetensi *personal religious* dapat dipahami sebagai kemampuan yang berkaitan dengan kepribadian seorang guru, karakteristik, sifat, perilaku, serta *performance*. Sementara kompetensi *professional religious* berkaitan dengan kemampuan pedagogis atau kemampuan yang berkaitan dengan interaksi pembelajaran (*teaching skill*). Terkait dengan kompetensi *personal religious*, Imam al-Ghazali berpandangan bahwa kemampuan tersebut mencakup: (1) kasih sayang terhadap peserta didik dan memperlakukannya sebagaimana anaknya sendiri; (2) peneladanan pribadi Rasulullah; (3) bersikap objektif; (4) bersikap luwes dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik; (5) bersedia mengamalkan ilmunya. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawy mencakup: (1) tujuan, tingkah laku dan pola pikirnya bersifat robbani; (2) bersikap ikhlas; (3) bersikap sabar; (4) bersikap jujur; (5) bersikap adil. Menurut Brikan Barky Al-Quraisyi mencakup: (1) mengajar hanya untuk mencari keridhaan-Nya; (2) bersedia mengamalkan ilmunya; (3) bersikap amanah; (4) bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap peserta didik (lihat Muhaimin: 2008; 97-98)

Hal ini sejalan dengan empat (4) kompetensi yang terdapat dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lahirnya UU tersebut telah berimplikasi pula pada adanya tuntutan peningkatan kompetensi guru dan dosen yang meliputi aspek kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial.

Terkait dengan penguasaan kompetensi pedagogik, GPAI harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan yang handal tentang peserta didik secara seimbang antara konsep pendidikan umum dengan konsep pendidikan Islam, baik

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berkaitan dengan (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (2) pemahaman terhadap peserta didik; (3) pengembangan kurikulum/silabus; (4) perancangan pembelajaran; (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6) evaluasi hasil belajar; dan (7) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga penguasaan kemampuan tentang pedagogik tidak lagi hanya berhenti pada wawasan/pengetahuan yang diperoleh dari ilmuan-ilmuan Barat, tetapi juga mengakomodir konsep-konsep pedagogik yang coba dikembangkan pemikir pendidikan Islam. Al-Gazali misalnya, menyebutkan bahwa sosok guru harus memiliki kemampuan yang mencakup: (1) menyajikan pelajaran sesuai dengan taraf kemampuan peserta didik; dan (2) terhadap peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak detail. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawy dalam bukunya Muhaimin disebutkan bahwa kemampuan pedagogis tersebut mencakup: (1) senantiasa membekali diri dengan ilmu dan mengkaji serta mengembangkan kemampuan profesionalnya; (2) mampu menggunakan variasi metode mengajar dengan baik, sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan situasi belajar mengajar; (3) mampu mengelola peserta didik dengan baik; (4) memahami kondisi psikis dari peserta didik; (5) peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan baru. (Muhaimin: 2008; 98) Dengan perpaduan konsep tersebut, diharapkan akan terlahir konsep baru yang *integrated* tentang ke 7 hal yang terkait dengan kompetensi pedagogik.

Berhubungan dengan kompetensi kepribadian, menurut undang-undang guru dan dosen dituntut memiliki kepribadian yang utuh, mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mampu melakukan evaluasi kinerja sendiri, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. Terkait dengan kompetensi tersebut, para pakar pendidikan Islam, seperti Muhammad Athiyah Al-Abrasy

menyebutkan minimal ada tujuh (7) sifat kepribadian yang harus dimiliki guru, yaitu: *Pertama*, seorang guru harus memiliki sifat zuhud, yaitu tidak mengutamakan untuk mendapat materi dalam tugasnya, melainkan karena mengharapkan keridlaan Allah semata-mata. *Kedua*, seorang guru memiliki jiwa yang bersih dan terhindar dari sifat dan akhlak yang buruk. Athiyah al-Abrasy mengatakan, seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa dan kesalahan, bersih jiwanya, terhindar dari dosa besar, pamer, dengki, permusuhan, dan sifat-sifat lainnya yang tercela menurut agama Islam. (al-Abrasy, 1999, 132). *Ketiga*, seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Sifat ini nampak sama dengan sifat yang pertama sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun, dalam uraiannya, Athiyah al-Abrasy mengatakan bahwa keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya dalam tugas dan sukses peserta didiknya. *Keempat*, seorang guru juga harus bersifat pemaaf terhadap peserta didiknya. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, banyak sabar, dan jangan pemaarah, karena sebab-sebab yang kecil. *Kelima*, seorang guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang bapak sebelum ia menjadi seorang guru. Dengan sifat ini seorang guru harus mencintai peserta didik-peserta didiknya seperti cintanya terhadap anak-anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka seperti ia memikirkan anak-anaknya sendiri. Mencintai peserta didik yang bukan anak kandungnya sendiri adalah merupakan pekerjaan yang secara psikologis cukup berat. Namun, apabila hal itu dapat dilakukan, maka sesungguhnya dialah seorang bapak yang suci dan seorang bapak yang teladan. Jika ia mengutamakan peserta didiknya dengan rasa kasih sayang, yaitu anak-anak miskin yang datang dari rumahnya masing-masing, dimana mereka mengalami penderitaan, maka hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi guru untuk menempatkan dirinya dalam hati si anak sebagai seorang

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bapak yang menyayanginya. Dengan cara demikian seorang peserta didik dengan rasa cinta dan sayang pula akan mematuhi segala ajaran yang diberikan oleh guru tersebut. *Keenam*, seorang guru harus mengetahui bakat, tabiat, dan watak peserta didik-peserta didiknya. Dengan pengetahuan seperti ini, maka seorang guru tidak akan salah dalam mengarahkan anak peserta didiknya. Pemahaman yang mendalam terhadap tabiat dan bakat para peserta didik termasuk bagian yang diharuskan oleh para pakar di abad modern ini. Oleh sebab itu, sebelum seorang peserta didik diberikan pelajaran tertentu, ia harus dites terlebih dahulu, termasuk di dalamnya adalah tes bakat dan wataknya. Dalam pendidikan Islam, seorang guru diharuskan berpengetahuan yang cukup tentang kesediaan dan tabiat anak-anaknya serta memperhatikan dengan seksama pada waktu kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Dengan cara demikian, guru dapat memilih mata pelajaran yang cocok bagi anak tersebut yang sejalan dengan tabiat dan kecerdasannya; dan *Ketujuh*, seorang guru harus menguasai bidang studi yang akan diajarkannya. Seorang guru harus sanggup menguasai mata pelajaran yang diberikan serta mendalami pengetahuannya tentang itu, sehingga pelajaran tidak bersifat dangkal, tidak memuaskan dan tidak menyenangkan orang yang lapar ilmu. Hal ini lebih ditekankan lagi pada guru yang mengajar di perguruan tinggi yang selanjutnya dikenal dengan istilah dosen. Penghormatan dan pemberian kedudukan para siswa untuk guru yang mengajar pada tingkat perguruan tinggi (dosen) sangat tinggi, berbeda jika dibandingkan dengan guru yang mengajar bukan pada tingkat perguruan tinggi. Hal ini terjadi karena penghormatan dan pemberian kedudukan itu, disesuaikan dengan tingkat dan prestasi yang dicapai oleh guru tersebut. Apa yang ditawarkan Athiyah tentang sifat yang harus dimiliki guru sangat sesuai dengan komponen kompetensi kepribadian sebagaimana diuraikan di atas. Hanya saja uraian yang ditawarkan masih “tercampur” antara kompetensi pedagogik dengan kompetensi professional.

Terkait dengan kompetensi sosial, tentu saja guru harus mampu melakukan komunikasi lisan dan tulisan dengan orang tua dan masyarakat. Hal ini terkait dengan adanya tanggung jawab pendidikan yang harus diemban oleh 3 pihak, yaitu pihak sekolah (guru), orang tua peserta didik, serta masyarakat. Dilihat dari tempat berlangsungnya pendidikan, maka Ki Hajar Dewantara, membedakan menjadi tiga dengan sebutan Tri Pusat Pendidikan, yaitu: Pendidikan dalam keluarga (pendidikan informal), pendidikan dalam sekolah (pendidikan formal), dan pendidikan di dalam masyarakat (pendidikan non formal). Adanya jenis kelembagaan pendidikan tersebut, menuntut perlunya kemampuan berkomunikasi antara ketiganya. Hal ini menjadi penting, karena berbagai permasalahan yang dihadapi peserta didik (baik di dalam maupun di luar kelas) dapat *dishare* sekaligus diberi alternatif solusinya. Kemampuan lainnya, guru juga harus mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, terbiasa bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

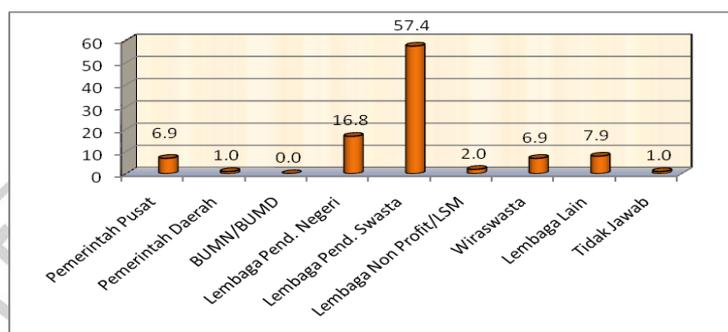
Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Bagi GPAI, penguasaan konsep keilmuan yang menjadi kebutuhan ketika berinteraksi dengan peserta didik mencakup penguasaan mata pelajaran al-Qur'an Hadis, Akidah, Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Fauzan, 2014

***Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berbagai persoalan tersebut yang kemudian berimplikasi pada munculnya **persoalan ketujuh**, yakni rendahnya kualitas lulusan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti jurusan/Prodi PAI FITK UIN Jakarta terkait dengan penelusuran alumni di dunia kerja, diperoleh data bahwa alumni PAI sebenarnya sudah tersebar di berbagai banyak lini pekerjaan.



Grafik 1.1. Bidang Pekerjaan Alumni Jurusan PAI

Sumber: Diolah dari data lapangan

Berdasarkan diagram di atas, secara umum tingkat penerimaan alumni Jurusan PAI FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di dunia kerja cukup bagus, dan tersebar dalam berbagai bidang pekerjaan. Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar alumni Jurusan PAI bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya, yaitu memilih lembaga pendidikan. Selain itu, ada juga yang masuk Lembaga pendidikan swasta sekaligus Tim Pengembangan kurikulum PAI Dit. PAI Kemenag RI dan Center For Study Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

GPAI atau Guru Agama –istilah yang diambil Azyumardi Azra—yang merupakan produk Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah sering menjadi kecaman berbagai kalangan masyarakat, karena dipandang gagal mengajarkan pendidikan agama dan akhlak kepada peserta didik. (Azyumardi Azra: 2002; 51) Guru agama lebih banyak berkutat pada proses penyampaian materi, penguatan wawasan akademik yang bersifat kognitif, sementara persoalan afeksi (*attitude* dan *integrity*) dan ketrampilan sebagai

pengamalan dari nilai keagamaan dalam kehidupan nyata kurang mendapatkan porsi yang cukup. Kondisi itulah yang kemudian berakibat pada lahirnya produk lulusan yang tidak utuh, antara penguasaan keilmuan dengan moralitas yang mestinya tampak pada perilaku keseharian.

Dilihat dari akses ke lapangan kerja, tampaknya kalangan dunia usaha lebih mempercayai lulusan PTU daripada lulusan PTAI. Lulusan PTU lebih mampu bersaing dengan lulusan dari PTAI (Mastuhu: 1999, 57). Ini merupakan permasalahan besar bagi para pemerhati dan para pengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya. Mengapa hal ini bisa terjadi, padahal muatan kurikulum yang seharusnya diajarkan sama, yakni berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL) sebagaimana diatur dalam Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi yang berbasis kompetensi.

Di sisi lain pihak-pihak lain juga menilai bahwa realitas di lapangan, kondisi PTAI juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: pertama: alumni PTAI umumnya cenderung berfikir normatif, mereka kurang mampu memahami konteks dan substansi empiris dari persoalan-persoalan agama. Dengan kelemahannya menangkap aspek empirisme dari berbagai problematika keagamaan yang timbul, ini berakibat pada kekurangmampuannya dalam mengemukakan alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang sifatnya cukup realistik. Implikasi lebih jauhnya adalah lahirnya sikap dan cara pandang terhadap agama dalam kaitannya dengan tantangan modernisasi cenderung sangat sempit, atau bersifat legalistik dan formalistik. Atas dasar ini, maka diperlukan wawasan empiris selain penguasaan terhadap teks-teks klasik. Untuk itu kerja sama kontak dan konsultasi dengan perguruan tinggi non-agama tidak dapat dihindari. Pada bagian lain, materi pengajaran yang berkaitan dengan pandangan-pandangan

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keagamaan, hendaknya juga berorientasi pada situasi nyata yang dihadapi oleh umat dewasa ini.

Kedua, sisi minus lain dari PTAI adalah kelemahannya di dalam mengembangkan pengetahuan baru. Kondisi ini sangat kontras dengan situasi dunia saat ini, yaitu menggejalanya pengaruh ledakan ilmu pengetahuan (*explosion of knowledge*) terhadap pola-pola pergaulan antara bangsa. Pada umumnya bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok yang mampu menghasilkan pengetahuan baru akan mampu merebut tempat yang menguntungkan dalam interaksinya dengan bangsa atau kelompok lain. Fakta menunjukkan bahwa dominasi kebudayaan Barat atau Jepang atas budaya-budaya lain di dunia ini, pada dasarnya disebabkan oleh kemampuan bangsa tersebut mengembangkan pengetahuan baru, informasi baru, teknologi baru dan budaya baru.

Lahirnya persoalan tersebut tentu saja tidak terlepas dari keberadaan pihak perguruan tinggi yang melahirkan calon-calon guru, LPTK dan Fakultas Tarbiyah. Perguruan tinggi kurang bisa menawarkan kurikulum yang membekali para calon guru dengan segenap kemampuan yang dibutuhkan, seperti kemampuan profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Keberadaan kurikulum kurang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan lapangan pekerjaan, atau kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan yang diinginkan. Ketidaksesuaian antara konsep kurikulum dengan SKL itulah yang kemudian berakibat pada rendahnya mutu dan ketiadaksiapan calon guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Rendahnya mutu lulusan tersebut, bisa saja terjadi karena rendahnya mutu SDM, rendahnya kualitas proses pembelajaran yang dilakukan, serta tawaran konsep kurikulum yang jauh dari harapan.

Bagi J. Sudarminta, rendahnya mutu guru antara lain tampak dari gejala-gejala berikut:

(1) lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan; (2) ketidaksesuaian antara bidang studi yang dipelajari guru dan yang dalam kenyataan lapangan diajarkan; (3) kurang efektifnya cara pengajaran; (4) kurangnya wibawa guru di hadapan peserta didik; (5) lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang sungguh-sungguh; (6) kurangnya kematangan emosional, kemandirian berfikir, dan keteguhan sikap sebagian guru sehingga dari kepribadian mereka sebenarnya tidak siap sebagai pendidik. Kebanyakan guru dalam hubungan dengan peserta didik masih hanya berfungsi sebagai pengajar dan belum sebagai pendidik; (7) relatif lebih rendahnya tingkat intelektual para calon guru yang masuk LPTK dibandingkan dengan yang masuk universitas. J. Sudarminta, "citra guru" dalam Sindhunata (ed.), *Pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman*, cet. Ke-5, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 260-261)

Mewujudkan guru profesional berarti akan sangat terkait dengan penyiapan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) –termasuk Fakultas Tarbiyah—menyiapkan satu rancangan/desain, mulai dari tahapan penerimaan (input), kurikulum yang disampaikan, kesiapan tenaga pengajar, proses pembelajaran, hingga evaluasi produk (*output*) yang dihasilkan.

Dalam perspektif kurikulum, untuk sampai pada kualitas hasil lulusan yang kompeten, LPTK seharusnya dapat menyuguhkan struktur kurikulum yang dibutuhkan, baik oleh dirinya ketika melakukan proses pembelajaran, memecahkan masalah (*problem solving*), maupun segenap keterampilan lain yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat global.

Pengelola pendidikan harus mampu menawarkan sebuah kurikulum yang mampu mengakomodir keinginan masyarakat, yakni orang tua, tokoh masyarakat, serta dunia usaha. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi tertentu punya "angan-angan" agar anaknya kelak memiliki segudang pengetahuan yang diandalkan, sikap/moralitas yang dapat diejawantahkan dalam kehidupan, sekaligus memiliki keterampilan (*skill*) mumpuni yang pada akhirnya nanti dapat bersaing dalam dunia usaha secara nasional maupun internasional.

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Oleh karena itu, keberadaan kurikulum harus dapat mengakomodir semua pihak yang terkait.

Kurikulum PAI FITK UIN Jakarta seharusnya menawarkan kurikulum yang dapat mengakomodir kebutuhan calon guru agama, baik di sekolah, maupun madrasah di semua jenjang pendidikan. Hal ini sesuai dengan visi yang dikemukakan di atas. Namun dalam penerapannya, kurikulum yang ditawarkan masih “abu-abu”, antara penyiapan calon guru agama di madrasah dengan di sekolah. Jika kurikulum disiapkan untuk menyiapkan calon guru agama di madrasah, maka secara *content* kurikulum harus diarahkan pada pemahaman tentang materi-materi Fiqh, Akidah Akhlak, Qur'an Hadis, Sejarah kebudayaan Islam (PAI madrasah) sesuai dengan kebutuhan guru di madrasah, yakni penguasaan terhadap materi PAI madrasah yang akan diajarkan. Selain pada proses pembentuk nilai karakter, peserta didik madrasah dituntut juga memiliki wawasan, bahkan penguasaan yang komprehensif tentang materi-materi PAI.

Sementara itu, jika kurikulum PAI FITK UIN Jakarta diarahkan untuk penguatan dan penyiapan calon guru agama di sekolah, maka *content* kurikulum yang disiapkan antara lain materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah, yakni hanya sebatas pada proses penanaman nilai agama, perilaku positif, serta pembentukan nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari, dan seharusnya bukan mengajarnya tentang materi-materi PAI. Ketidakjelasan arah kurikulum PAI FITK UIN Jakarta ini yang kemudian berimplikasi pada *learning outcome* atau sasaran pembelajaran yang diharapkan.

Berbagai persoalan itulah yang saat ini dihadapi jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) FITK UIN Jakarta. Hingga saat ini persoalan kurikulum masih menjadi persoalan yang harus dipecahkan. Bagaimana keberadaan kurikulum PAI FITK UIN Jakarta mampu membentuk generasi handal dengan kompetensi, kecakapan dan karakter yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Kondisi ini yang mendasari perlunya dilakukan penelitian yang memfokuskan pada persoalan pada pentingnya satu model kurikulum jurusan PAI UIN Jakarta yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diharapkan.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, banyak permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

- 1) Kurikulum PAI FITK UIN Jakarta masih belum ada arah yang pasti, apakah disiapkan untuk calon guru PAI di madrasah atau PAI di sekolah. Keduanya memiliki substansi arah yang berbeda, jika PAI madrasah diarahkan pada penguasaan konsep/materi PAI, tetapi PAI sekolah diarahkan pada proses pembentukan *akhlak al-karimah*.
- 2) Kondisi tersebut berimplikasi pada keberadaan kurikulum yang tidak berbasis pada Standar kompetensi lulusan (SKL) yang diharapkan, bahkan rumusan Silabus dan SAP juga tidak sesuai dengan SKL Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- 3) Lebih spesifik lagi, rumusan tentang kompetensi dasar dan indikator kompetensi sebagai penjabaran dari standar kompetensi lulusan yang ada di Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) juga tidak tampak jelas.
- 4) Kurikulum PAI tidak mengakomodir kebutuhan calon guru agama dengan penguasaan empat kompetensi yang diharapkan. Hal ini berimplikasi pada menonjolnya penguasaan kompetensi tertentu, tetapi lemah pada penguasaan kompetensi yang lain.
- 5) Dalam proses perkuliahan, masih ada sebagian dosen yang belum menggunakan metode secara variatif, kondisi tersebut berakibat pada

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

minimnya pemahaman mahasiswa, baik terhadap konten materi ajar yang diberikan maupun pada aspek penerapan metodologi pembelajarannya;

- 6) Penguasaan konten materi ajar ke PAI an masih sangat dominan ketimbang pembekalan materi pedagogik atau *teaching skill* yang sangat dibutuhkan untuk semua calon guru;
- 7) Kemampuan mahasiswa dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menerapkan metode interaktif masih sangat lemah. Kondisi tersebut bias diakibatkan oleh kurangnya mata kuliah yang mengarah pada penguatan konten pedagogik guru.

Mengingat banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, maka penelitian tentang “Studi Evaluasi Kurikulum PAI (Pendidikan Agama Islam) dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru” ingin menjawab pertanyaan “*Bagaimana Pelaksanaan Kurikulum Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru*”?

Adapun pertanyaan penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan kompetensi kurikulum Jurusan PAI UIN Jakarta yang dibutuhkan masyarakat?
2. Bagaimana relevansi (keterkaitan) kurikulum Jurusan PAI dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki guru?
3. Bagaimana kesiapan SDM terkait dengan penerapan kurikulum PAI yang berbasis kompetensi pedagogik?
4. Bagaimana implementasi kurikulum Program Studi PAI terkait dengan peningkatan kompetensi pedagogik calon guru?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kurikulum di Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sementara tujuan khusus penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui rumusan kompetensi kurikulum Jurusan PAI UIN Jakarta yang dibutuhkan masyarakat;
2. Mengetahui relevansi (keterkaitan) kurikulum Jurusan PAI dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki guru;
3. Mengetahui kesiapan SDM terkait dengan penerapan kurikulum PAI yang berbasis kompetensi pedagogik;
4. Mengetahui proses implementasi kurikulum Jurusan PAI terkait dengan peningkatan kompetensi pedagogik calon guru;

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan secara teoritis. Kegunaan secara praktis adalah: *pertama*, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan dan penyempurnaan kurikulum potensial (kurikulum dalam bentuk program) Jurusan/Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta baik menyangkut rumusan kompetensi, mata kuliah/bahan kajian, sistem pembelajaran /perkuliahan, maupun sistem penilaian. *Kedua*, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan implementasi kurikulum Jurusan/Prodi PAI terutama terkait dengan penyusunan program pembelajaran, pembinaan kinerja dalam mengikuti

Fauzan, 2014

*Studi evaluasi kurikulum pai (pendidikan agama islam)
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kegiatan perkuliahan, dan kinerja dosen dalam menyelenggarakan kegiatan perkuliahan dan penilaian. *Ketiga*, hasil penelitian juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan penyelenggaraan kegiatan Praktik Profesi Keguruan Terpadu (P2KT) di Jurusan/Prodi PAI. *Keempat*, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan model pendidikan profesi bagi calon guru agama Islam. *Kelima*, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pihak Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Dirjen Binbaga Islam dalam mengkaji kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berada di lingkungan Kementerian Agama RI.

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pendidikan Islam khususnya terkait dengan pengembangan sistem pendidikan pada Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) terutama menyangkut pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian, serta model pelaksanaan praktik pengalaman lapangan (PPL). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengkaji tentang pengembangan kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.